

# ANALISIS PENGEMBANGAN OBYEK WISATA OETUKE UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN BUMDES NEKAMESE DI DESA OETUKE KEC. KOLBANO KAB. TTS

*Analysis of Oetuke Tourism Object Development to Increase Income  
of Nekamese BUMDes in Oetuke Village, Kolbano Sub-District, TTS  
Regency*

Nurul Widyastuti<sup>1,a)</sup>, Wehelmina M. Ndoen<sup>2,b)</sup> Reyner F. Makatita<sup>3,c)</sup> & Petrus E. de Rozari<sup>4,d)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup> Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

**Koresponden :** <sup>a)</sup> nurulwidyastuti1001@gmail.com, <sup>b)</sup> wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id  
<sup>c)</sup> reynermakatita@staf.undana.ac.id, <sup>d)</sup> petrus.rozari@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan obyek wisata Oetuke untuk meningkatkan pendapatan Bumdes Nekamese di Desa Oetuke Kec. Kolbano, Kab. TTS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian campuran yang datanya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis model dari Milis dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pengembangan obyek wisata oetuke seperti membangun cafe, toko, perbaikan infrastruktur, dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru sehingga pendapatan Bumdes meningkat; Faktor-faktor yang menghambat pengembangan Pantai Oetuke seperti kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat lokal, tidak adanya promosi yang dilakukan, kurang memadainya sarana prasarana objek wisata dan fasilitas penunjang; Berdasarkan arus kas (cash flow) pendapatan bersih bumdes mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali meningkat dari tahun 2022 hingga 2025.

**Kata Kunci :** Pengembangan Pariwisata, Pendapatan Bumdes, Faktor Penghambat, Arus Kas

## PENDAHULUAN

Sektor pariwisata adalah satu dari beberapa sektor yang berperan penting didalam pembangunan sebuah negara dimana pariwisata dengan langsung berkontribusi lebih bagi pendapatan daerah melalui peningkatan kesempatan kerja, pendapatan kerja, di mana objek wisata tersebut berada. Pariwisata adalah satu dari beberapa sektor yang berpotensi untuk berkontribusi mendongkrak perekonomian sebuah negara. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan obyek serta daya tarik wisata, dan sektor pariwisata juga adalah salah satu sektor andalan yang bisa memberi nilai serta keuntungan signifikan untuk kemajuan Indonesia.

Pengembangan pariwisata berdampak langsung bagi masyarakat, secara positif ataupun negatif. Dampak positif dilihat melalui sudut pandang ekonomi makro berbentuk munculnya peluang berusaha, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kemakmuran dan mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah serta retribusi daerah, meningkatkan pendapatan nasional, mendorong peningkatan investasi industri pariwisata serta memperkuat neraca pembayaran (Yoeti O. A., 2008). Tetapi dampak negatif yang muncul semacam perubahan sosial, pencemaran lingkungan serta faktor keamanan. Dalam penelitian ini peneliti memakai empat indikator pengembangan pariwisata yaitu kesejahteraan, partisipasi masyarakat dalam pariwisata, manfaat ekonomi dari pariwisata, dan perencanaan dan kontrol destinasi (World Tourism Organization, 2004). Pendapatan adalah upah ataupun gaji yang seseorang terima baik berbentuk barang ataupun uang yang adalah hasil bekerja ataupun berusaha. Indikator Pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bunga dkk (2022) tentang Pengembangan Pariwisata Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Kawasan Wisata Kabupaten TTS memperoleh hasil bahwa pemerintah kabupaten TTS mengembangkan daerah wisata dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan usaha, memberikan bantuan dana, serta perbaikan infrastruktur. Akan tetapi hal itu belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dikarenakan anggaran pariwisata yang kecil dan ketiadaan investor serta masalah kepemilikan lahan yang belum terselesaikan.

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Pantai Oetuke, terlihat bahwasanya Pesona pantainya sangat menakjubkan dengan hamparan batu warna dan pantainya yang bersih, apalagi di bibir pantai terdapat hamparan perbukitan yang menghujau menambah suasana panorama alam yang indah. Pantainya bisa digunakan sebagai sarana permandian dengan ombak yang cukup besar. Pengunjung yang datang ke obyek wisata ini untuk sekedar mandi air laut, terdapat kolam renang air tawar baik yang diperuntukan bagi anak-anak maupun untuk orang dewasa, Adapun sejumlah sarana serta prasarana yang mendukung objek wisata itu semacam sejumlah Lopo, Sarana MCK, Penyewaan Tenda, Kursi, Genset, Penginapan, dan juga Parkiran yang cukup memadai yang ada di lokasi. Namun tempat wisata ini bisa disebut belum dikelola secara maksimal. Lopo-lopo yang dibangun oleh BUMDes masih sangat kurang dan ada beberapa yang sudah mulai rusak, pengunjung masih kesulitan untuk menemukan tempat pembuangan sampah sekitar objek wisata tersebut, Sarana MCK yang ada kurang bersih dan lapak penjual makanan yang ada hanya menyediakan beberapa jenis makanan ringan, minuman sachet dan juga mie instan sehingga masih perlu perhatian pemerintah dalam pengembangan.

Pantai Oetuke di Kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu BUMDes Nekamese yang telah berdiri sejak 18 Desember 2020. BUMDes Nekamese mendapat bantuan modal awal dari Pemerintah Desa sebesar Rp.50.000.000 yang digunakan untuk pengembangan tempat wisata oetuke. Sebagai gambaran pendapatan BUMDes Nekamese pada satu bulan awal yakni sebesar Rp17.835.000,-. Dimana pendapatan tersebut berasal dari retribusi masuk senilai Rp.12.805.000,- kemudian pendapatan dari penyewaan villa sebesar Rp.750.000,- pendapatan dari pembelian makanan dan minuman yang dijual sebesar Rp.3.580.000,- dan juga pendapatan dari para pelaku usaha yang menyewa tempat di sekitar objek wisata yaitu sebesar Rp.700.000,-. Namun pendapatan bumdes menurun pada tahun

2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022. Sesuai dengan data diatas bisa dilihat bahwasanya pendapatan BUMDes Nekamese tidak cukup besar sehingga masih sangat kurang dalam pengembangan pariwisata pantai oetuke. Adapun permasalahan lainnya yaitu dilihat dari aspek hukum yaitu adanya perbedaan pendapat antara pemerintah desa dan BUMDes dimana BUMDes mengklaim bahwa tanah tempat wisata adalah milik mereka sendiri sedangkan pemerintah desa berkata bahwa tanah tersebut adalah jalur hijau yang mana itu merupakan milik pemerintah. Dan peneliti juga ingin melakukan penelitian terkait faktor yang menghambat pengembangan pariwisata pantai oetuke serta melalui analisa komponen arus kas, maka dapat diketahui bagaimana BUMDes mengelola dana yang dimilikinya dan kesanggupan bumdes dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan penelitian 1) Analisis pengembangan obyek wisata Oetuke Untuk Meningkatkan Pendapatan BUMDes Nekamese di Desa Oetuke Kec. Kolbano Kab TTS. 2) Faktor-faktor yang menghambat pengembangan obyek wisata Pantai Oetuke. 3) Analisis arus kas (*Cash flow*) BUMDes Nekamese.

## STUDI PUSTAKA

### Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan menuju suatu tempat wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bersifat hanya untuk sementara dengan tujuan untuk memuaskan keinginannya seperti melihat alam, budaya masyarakat sekitar, dan bukan untuk melakukan kegiatan berdagang (Yoeti O. A., 1996). Pengembangan pariwisata adalah serangkaian cara yang dilangsungkan guna mencapai tujuan serta sasaran pembangunan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dalam pengembangan obyek serta daya tarik wisata menurut (Yoeti, 1997) syarat dari suatu obyek wisata yaitu *something to see*, *something to do* dan *something to buy*.

Pengembangan pariwisata merupakan usaha melakukan pengembangan serta pemanfaatan daya tarik wisata yang terwujud diantaranya berbentuk kekayaan alam yang indah, keberagaman flora fauna, kemajemukan tradisi serta seni dan peninggalan sejarah (Surahman, Sudiarta, & Ketut, 2020).

Indikator pengembangan pariwisata dalam penelitian ini (World Tourism Organization, 2004):

1. Kesejahteraan, pengukuran untuk indikator ini adalah kepuasan warga lokal terhadap masyarakat sekitar, pengaruh pariwisata terhadap masyarakat sekitar, akses dari penduduk lokal/wisatawan ke tempat wisata.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata, pengukuran untuk indikator ini adalah ketersediaan informasi, akses informasi, dan dampak informasi.
3. Manfaat Ekonomi dari Pariwisata, pengukuran untuk indikator ini adalah tenaga kerja pariwisata, pariwisata sebagai kontributor konservasi alam, manfaat ekonomi terhadap penduduk lokal dan destinasi, pariwisata dan pengentasan kemiskinan.
4. Perencanaan dan Kontrol Destinasi, pengukuran untuk indikator ini integrasi pariwisata dengan penduduk lokal atau perencanaan regional, kontrol pengembangan, transportasi untuk pariwisata

## Pendapatan

Pendapatan merupakan medium penerimaan berbentuk barang ataupun uang dari pihak lain ataupun hasil sendiri yang diawali oleh sejumlah uang ataupun jasa atas dasar harga yang berlaku pada masa tersebut (Winardi, 2000). Pendapatan adalah hasil pencarian atau memperoleh dari usaha dan bekerja (Maisyaroh, 2018). Pendapatan adalah hasil penjualan barang dagang. Penjualan timbul karena terjadi transaksi jual-beli barang antara penjual dan pembeli. Tidak peduli apakah transaksi tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai, kredit, atau sebagian tunai atau sebagian kredit. Selama barang sudah diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, hasil penjualan tersebut sudah termasuk sebagai pendapatan (Kuswadi, 2008). Menurut (Kuswadi, 2008), pendapatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pendapatan kotor, dalam proses penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan secara langsung disebut pendapatan kotor.
2. Pendapatan bersih, Pendapatan bersih atau laba usaha merupakan pendapatan kotor dikurangi dengan semua beban usaha atau biaya operasi. Pendapatan bersih atau laba usaha (*operating profit*) ini merupakan laba yang diperoleh suatu usaha dari aktivitas usaha atau operasinya (sesuai dengan maksud didirikannya suatu usaha), belum dikenai biaya pinjaman dana (*cost of funding*) jika ada.

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan sebuah lembaga ekonomi modal usahanya terbangun atas inisiatif masyarakat serta memiliki asas mandiri. Itu artinya pemenuhan modal usaha BUMDes berasal dari masyarakat. Meskipun begitu, masih terbuka peluang BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar semacam Pemerintah Desa ataupun pihak lainnya, bahkan melalui pihak ketiga. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes.

Berdasarkan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2007 terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara Bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

## Faktor penghambat

Dalam pengembangan suatu daya tarik wisata tidak terlepas dari kondisi maupun pihak yang dapat menghambat keberlangsungan pengembangan pariwisata yang ada disuatu daerah maupun negara. Faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan suatu kegiatan, usaha atau produksi (Wibowo, 2016). Menurut Heri (2011:25), pengembangan daya tarik wisata pasti tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini:

1. Kurangnya peran serta partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata
2. Kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten terhadap sektor pariwisata
3. Kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada dinas terkait
4. Kurangnya kerja sama dengan investor
5. Belum terdapat sistem promosi yang menarik
6. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata
7. Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata

## Arus Kas

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 Tahun 2009, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013). Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Menurut Darsono (2005), terdapat dua metode dalam penyusunan laporan arus kas, antara lain Metode Langsung (*Direct Method*), metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap (*gross*), tanpa melihat laporan laba atau rugi dan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan, dan Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*), metode ini penyajiannya dimulai dari laba rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Jadi pada dasarnya metode tidak langsung ini merupakan rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Metode ini memberikan suatu rangkaian hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan neraca.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, dimana hasil penelitian ini hanya berlaku pada lokasi dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*), yaitu dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan metode kualitatif. Sugiyono (2017) menyebutkan, metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, realibel dan objektif. Pada penelitian ini digunakan dua jenis data yakni data primer yakni data yang didapatkan dengan langsung dari pihak terkait, melalui wawancara mendalam dengan pengelola objek wisata pantai oetuke yaitu Bumdes Nekamese dan Pelaku usaha sekitar tempat wisata. Dan juga observasi langsung pada tempat, serta data sekunder yakni data yang bisa didapatkan melalui sejumlah

literatur, dokumen yang berkaitan pada permasalahan yang hendak dibahas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Interaktif Analysis Model dari Milis dan Huberman, dengan proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **ANALISIS PENELITIAN**

### **Hasil Penelitian**

Pengembangan Pariwisata seperti objek wisata merupakan aktivitas yang terus-menerus dilakukan untuk perbaikan sarana dan prasarana objek wisata sehingga memenuhi selera wisatawan. Dalam upaya pengembangan pariwisata perlu didukung oleh pengembangan kawasan rekreasi dan wisata yang merupakan salah satu prioritas program pembangunan pariwisata. Pengembangan Pariwisata juga diketahui melalui hasil wawancara dengan informan kunci dengan indikator- indikator dari World Tourism Organization (2004) sebagai berikut:

Kesejahteraan, dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata yakni kesejahteraan seperti kepuasan warga lokal terhadap pariwisata cukup bagus karena dengan adanya pantai oetuke bisa menambah penghasilan masyarakat dan juga terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal, namun masih banyak masyarakat sekitar yang kurang pengetahuan tentang potensi desa yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata. pengaruh pariwisata terhadap masyarakat sekitar juga bagus karena masyarakat mendapatkan keuntungan dari berjualan di lokasi wisata dan akses dari penduduk lokal/wisatawan ke tempat wisata cukup bagus hanya saja akan sulit dilewati pada saat musim hujan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata, dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata yakni partisipasi masyarakat dalam pariwisata seperti ketersediaan informasinya belum ada akan tetapi sudah dalam rencana kedepannya akan dibuatkan denah informasi pantai oetuke, akses informasi pantai oetuke hanya bisa ditemukan dari postingan orang-orang ataupun artikel saja, dan dampak dari adanya informasi ini semakin banyak orang yang mengetahui obyek wisata oetuke namun informasi yang ada masih kurang, dan para pelaku usaha berjualan di dalam lokasi wisata namun dikarenakan covid-19 yang membuat wisatawan jadi berkurang makan para pelaku usaha memindahkan lapak jualan mereka keluar pinggir jalan karena dengan berjualan dipinggir jalan pendapatan mereka lebih besar karena banyak kendaraan yang berlalu-lalang dan juga travel selalu lewat sana jika bepergian kupang-malaka, jadi para pelaku usaha bisa mendapat penghasilan lebih besar dengan berjualan di pinggir jalan.

Manfaat Ekonomi dari Pariwisata, dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan manfaat ekonomi dari pariwisata yakni tenaga kerja yang ada di pantai oetuke yaitu bumdes itu sendiri dan bumdes sendiri tidak membagi pekerjaannya secara khusus, manfaat dengan adanya pantai oetuke juga dapat menciptakan lapangan kerja dan juga peluang usaha baru, sehingga dapat mengurangi kemiskinan penduduk lokal. Retribusi masuk lokasi wisata seharga Rp.5000/perorang dan Rp.5.000/mobil, jadi misalkan dalam satu mobil berisi 4 orang maka harus membayar biaya retribusi masuk sebesar

Rp.25.000,- Kenaikan retribusi berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyesuaikan biaya operasional yang dibutuhkan oleh bumdes. Usaha kuliner di sediakan oleh bumdes tidak banyak variannya. Hanya terdapat mie instan, telur, dan makanan ringan seperti sari gandum, roma kelapa, permen-permen, dan sebagainya dan minumannya hanya teh, kopi, sprite, aqua botol, dan sebagainya, juga ada sabun batangan, pasta gigi, dan sampo sachetan. Perlu adanya penambahan berbagai jenis makanan dan minuman yang bisa di sesuaikan dengan kesukaan kebanyakan orang sekarang yang bisa membuat orang tertarik untuk membelinya. Bumdes juga menyediakan dua villa bagi wisatawan yang ingin menginap seharga Rp. 250.000/malamnya dan untuk kedepannya bumdes merencanakan untuk menambah kamar villa karena villa yang ada sekarang sangat minim selain itu juga dengan menambah villa dapat membantu wisatawan yang datang beramai-ramai dan membutuhkan penginapan dan juga dapat meningkatkan minat wisatawan ke pantai oetuke. Adapun sarana prasarana di pantai oetuke seperti lopo-lopo, kolam renang, tempat bermain anak, toilet dan juga bumdes merencanakan untuk membangun cafe di pantai oetuke dan lapak jualan di dalam lokasi akan dibongkar dan dijadikan aula. Dengan di dirikan cafe dan aula di pantai oetuke diharapkan dapat memengaruhi minat kunjungan wisata ke pantai oetuke, karena dengan di dirikannya cafe dapat membantu membuka lapangan kerja baru, dapat meningkatkan usaha kuliner dan souvenir., menyejahterakan kehidupan masyarakat sekitar pantai dan juga meningkatkan pendapatan bumdes sendiri.

Perencanaan Dan Kontrol Destinasi, dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan perencanaan dan kontrol destinasi yakni masyarakat tidak dilibatkan secara aktif terkait integrasi pariwisata dan perencanaan regional, masyarakat hanya aktif terlibat di bidang usaha saja selain itu yang mengatur semua perencanaan dan kontrol pengembangan ialah bumdes, selain itu juga tidak terdapat transportasi ke tempat wisata yang disediakan oleh bumdes karena kurangnya dana, dan lebih banyak wisatawan yang datang menggunakan kendaraan pribadi mereka.

Pendapatan adalah hasil penjualan barang dagang. Penjualan timbul karena terjadi transaksi jual-beli barang antara penjual dan pembeli. Tidak peduli apakah transaksi tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai, kredit, atau sebagian tunai atau sebagian kredit. Selama barang sudah diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, hasil penjualan tersebut sudah termasuk sebagai pendapatan (Kuswadi, 2008). Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pendapatan kotor bumdes pada tahun 2020 mengalami penurunan pada masa covid-19 tahun 2021 tapi pada tahun 2022 kembali meningkat hal ini disebabkan karena adanya ppkm dalam rangka menekan penyebaran kasus Covid-19 dan juga tidak adanya pengembangan di pantai oetuke yang menarik minat wisatawan yang datang selain keindahan alami pantai oetuke itu sendiri. Lalu pendapatan bersih bumdes pada sebulan pertama cukup besar namun pada 2021 pendapatan bersih bumdes menurun, pada tahun 2021 ini pendapatan bersih bumdes menurun jauh jika dibandingkan dengan sebulan pertama tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) dalam rangka menekan penyebaran kasus Covid-19. Sehingga membuat wisatawan yang datang ke pantai oetuke berkurang. Lalu pada tahun 2022 pendapatan bersih bumdes meningkat namun tidak signifikan hal disebabkan tidak adanya pengembangan di pantai oetuke yang menarik minat wisatawan yang datang selain keindahan alam pantai oetuke itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti di Pantai Oetuke, berikut adalah faktor-faktor yang menghambat pengembangan obyek wisata pantai oetuke:

1. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat lokal terhadap perencanaan dan pengelolaan pengembangan pariwisata pantai oetuke.
2. Tidak adanya promosi yang dilakukan oleh bumdes maupun pemerintah desa
3. Kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata
4. Masyarakat lokal masih menganggap bahwa pantai oetuke masih milik masyarakat sehingga pemerintah desa sulit untuk ikut campur dalam pengembangan pariwisata pantai oetuke.

Arus kas operasi adalah salah satu klasifikasi dari laporan arus kas yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Berikut adalah arus kas realisasi bumdes dari tahun 2020-2023 dan arus kas proyeksi dari tahun 2024-2025.

**Tabel 1.**  
Arus Kas Bumdes Nekamese (Metode Langsung)

DESKRIPSI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>CASH INFLOW</b>						
Setoran modal awal	Rp 50,000,000	-	-	-	-	-
Penerimaan dari pengunjung	Rp 12,805,000	Rp 65,325,000	Rp 70,660,000	Rp 75,860,000	Rp 80,555,000	Rp 86,435,000
Penerimaan lain	Rp 700,000	Rp 4,575,000	Rp 3,300,000	Rp 3,300,000	Rp 3,300,000	Rp 3,300,000
Penjualan makanan & minuman	Rp 3,580,000	Rp 5,467,000	Rp 6,835,000	Rp 7,655,200	Rp 9,573,000	Rp 11,601,800
Sewa villa	Rp 750,000	Rp 3,500,000	Rp 4,750,000	Rp 5,250,000	Rp 7,250,000	Rp 8,500,000
<b>TOTAL CASH INFLOW</b>	<b>Rp 67,835,000</b>	<b>Rp 78,867,000</b>	<b>Rp 85,545,000</b>	<b>Rp 92,065,200</b>	<b>Rp 100,678,000</b>	<b>Rp 109,836,800</b>
<b>CASH OUTFLOW</b>						
Pembelian properti dan peralatan	Rp 35,654,000	-	-	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	-
Pembayaran gaji	Rp 14,715,960	Rp 58,863,840	Rp 58,863,840	Rp 58,863,840	Rp 58,863,840	Rp 58,863,840
Pengeluaran administrasi dan operasi umum	Rp 3,000,000	Rp 1,200,000	Rp 1,070,000	Rp 1,700,000	Rp 2,150,000	Rp 2,000,000
Pembayaran beban listrik	Rp 500,000	Rp 3,250,000	Rp 3,500,000	Rp 3,800,000	Rp 4,000,000	Rp 4,250,000
Pembelian persediaan (stok)	Rp 2,500,000	Rp 4,700,000	Rp 4,400,000	Rp 4,600,000	Rp 5,000,000	Rp 5,400,000
Pajak	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CASH OUTFLOW</b>	<b>Rp 56,369,960</b>	<b>Rp 63,313,840</b>	<b>Rp 67,833,840</b>	<b>Rp 78,963,840</b>	<b>Rp 85,013,840</b>	<b>Rp 70,513,840</b>
<b>NET CASH FLOW</b>	<b>Rp 11,465,040</b>	<b>Rp 15,553,160</b>	<b>Rp 17,711,160</b>	<b>Rp 13,101,360</b>	<b>Rp 20,664,160</b>	<b>Rp 39,322,960</b>
<b>% kenaikan</b>		<b>0,35%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-0,26%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,90%</b>

Sumber: data diolah, 2023

Pada awalnya pemerintah desa memberikan bantuan modal awal kepada bumdes untuk pembangunan pantai oetuke, lalu bumdes menggunakan uang tersebut untuk membangun lopo, lapak jualan, toilet, sarana bermain anak, etalase, meja, kursi, genset dan sebagainya. Saat awal pembukaan tempat wisata pantai oetuke pada 18 desember tahun 2020 penghasilan bumdes dalam sebulan pertama didapat dari retribusi masuk, pelaku usaha yang menyewa lapak, lalu penjualan makanan dan minuman dan dari sewa villa. Pendapatan bumdes pada sebulan awal cukup besar namun pendapatan bumdes menurun pada tahun 2021 sebab pendapatan pada tahun 2020 hanya terjadi pada bulan desember, sedangkan pendapatan pada tahun 2021 setelah di hitung perbulannya lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2022 pendapatan bumdes meningkat dibanding tahun 2021 ini disebabkan karena wisatawan yang berkunjung ke pantai oetuke melonjak dibandingkan tahun 2021, sehingga berdampak kepada pendapatan bumdes. Akan tetapi para pelaku usaha memilih untuk berjualan di luar tempat wisata yang mana adalah di pinggir jalan dengan begitu sewa lapak usaha ini dari Rp.100.000/bulan menjadi Rp.25.000,-/bulan. penjualan makanan dan minuman meningkat namun tidak terlalu signifikan hal ini disebabkan oleh makanan dan minuman yang ada kurang bervariasi dan hanya itu-itu saja sehingga membuat wisatawan yang datang kurang tertarik, selain itu juga kebanyakan wisatawan yang datang membawa makanannya sendiri. Lalu pendapatan dari sewa villa meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 hal ini disebabkan oleh masa covid-19 yang telah selesai sehingga wisatawan bisa bebas berwisata namun properti yang ada di dalam villa kurang menarik bagi wisatawan sehingga perlu ditingkatkan lagi agar para wisatawan bisa tertarik untuk menginap di villa pantai oetuke. Arus kas diatas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pendapatan bumdes pada saat awal pantai oetuke di operasikan cukup besar dan setelah dihitung pendapatan bersih bumdes mencapai Rp.11,465,040,- dalam satu bulan tetapi dikarenakan covid-19 pendapatan bumdes jadi menurun pada tahun 2021 dan setelah covid-19 baru ada peningkatan kembali pada tahun 2022 dan seterusnya sampai sekarang, bumdes juga mendapatkan banyak pemasukan di hari-hari tertentu seperti hari raya idul fitri, natal, dan tahun baru.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengembangan Obyek Wisata Oetuke Untuk Meningkatkan Pendapatan BUMDes Nekamese di Desa Oetuke Kec. Kolbano Kab. TTS**

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan objek wisata yang bertujuan untuk memberikan manfaat pelestarian, serta pemanfaatan potensi wisata. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pengembangan pariwisata:

Kesejahteraan masyarakat lokal dan bumdes mengalami peningkatan, hasil ini memberikan bukti bahwa dengan adanya lokasi wisata pantai oetuke dapat mendatangkan banyak wisatawan yang memiliki dampak pada peningkatan perekonomian bumdes dan masyarakat lokal menjadi lebih sejahtera. Namun akses jalan ke lokasi wisata kurang baik sehingga perlu perhatian pemerintah desa agar dapat memperbaiki akses jalan tersebut karena dengan akses yang mudah dijangkau akan membuat wisatawan tidak jera datang

berkunjung ke tempat wisata pantai oetuke sehingga pendapatan bumdes dan masyarakat dapat terus meningkat.

Partisipasi masyarakat dalam pariwisata masih kurang dalam pengembangan pariwisata pantai oetuke. Ketersediaan informasi tentang pantai oetuke harus dilakukan oleh pengelola objek wisata, pemerintah desa, dan masyarakat lokal karena dengan adanya informasi yang bertujuan untuk mengenalkan obyek wisata maka akan banyak wisatawan yang tertarik untuk datang. Untuk itu perlu adanya penyediaan informasi terkait pantai oetuke baik secara online maupun offline. Media promosi online contohnya seperti Instagram, facebook, youtube dan media cetak majalah. Selain itu bisa menjalin kerja sama dengan pihak travel agent, himpunan pramuwisata/*tour guide*, serta pemerintah desa.

Manfaat ekonomi dari pariwisata, dengan adanya pantai oetuke dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar namun tenaga kerja bumdes berkurang semenjak covid-19 sehingga dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata serta masyarakat yang terlibat dalam pariwisata pantai oetuke hanya segelintir saja karena mayoritas masyarakat lokal mata pencahariannya petani karena kurangnya kesadaran wisata masyarakat itu sendiri. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pelatihan oleh pemerintah desa yang ditujukan untuk masyarakat lokal, seperti sosialisasi sadar wisata, pelatihan pengembangan sumber daya manusia, dan pembinaan terhadap usaha pariwisata dengan begitu masyarakat dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada maka dari segi pendapatan akan meningkat.

Perencanaan dan kontrol destinasi, Masyarakat harus terlibat aktif dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Karena Tujuan pengembangan pariwisata tersebut adalah meningkatkan pendapatan bumdes dan masyarakat lokal, sehingga diharapkan dapat memberikan peluang dan akses bagi masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengembangan usaha, seperti pariwisata penunjang. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat lokal dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan langsung dari wisatawan secara lebih ekonomis seperti melalui toko kerajinan, toko souvenir, warung makan dan sejenisnya sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh lebih banyak manfaat ekonomi langsung dari wisatawan.

Pendapatan bumdes pada bulan awal pembukaan obyek wisata dapat cukup tinggi akan tetapi seiring berjalannya waktu pendapatan bumdes menurun yang mengakibatkan kurangnya dana bumdes yang akan digunakan untuk pengembangan Pantai Oetuke, pada tahun 2022 pendapatan bumdes mulai meningkat sehingga bumdes bisa melanjutkan rencana pengembangannya dan bisa menarik lebih banyak wisatawan sehingga pendapatan bumdes dapat meningkat.

## 2. Faktor-faktor yang menghambat pengembangan obyek wisata pantai Oetuke

Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata pantai oetuke adalah kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat lokal terhadap perencanaan dan pengelolaan pengembangan pariwisata pantai oetuke, karena untuk pengembangan pariwisata juga dibutuhkan partisipasi masyarakat lokal, selain itu tidak adanya promosi yang dilakukan oleh bumdes maupun pemerintah desa terkait pariwisata Pantai Oetuke, hanya ada promosi yang dilakukan oleh wisatawan yang datang dan mengabadikan momen mereka

di Pantai Oetuke dan di post di sosial medianya. Kurang memadainya sarana prasarana objek wisata serta fasilitas penunjang seperti akses jalan kurang memadai, lampu penerangan, fasilitas informasi, jaringan telekomunikasi, serta masyarakat lokal masih menganggap bahwa Pantai Oetuke masih milik masyarakat sehingga pemerintah desa sulit untuk ikut campur dalam pengembangan pariwisata Pantai Oetuke.

### 3. Arus kas (*Cash flow*) BUMDes Nekamese

Berdasarkan hasil perhitungan arus kas (*cash flow*) bumdes nekamese pada saat awal pantai oetuke pendapatan bumdes dalam sebulan awal mencapai belasan juta namun setelah itu pendapatan bumdes menurun. Diketahui pada tahun 2021 persentase kenaikan pendapatan hanya 0,35% ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat pantai oetuke sepi pengunjung dan pada tahun 2022 kenaikan pendapatan bumdes sebesar 0,13% lebih rendah dibandingkan tahun 2021 hal ini disebabkan oleh perpindahan lapak yang disewa para pelaku usaha yang tadinya berada di dalam lokasi wisata ke luar lokasi wisata. Pada tahun 2023 persentase pendapatan bumdes mengalami penurunan menjadi -0,26% hal ini karena pengeluaran bumdes ditahun 2023 dalam pembelian properti dan peralatan untuk pembuatan cafe dsb, lalu dengan adanya pengembangan fasilitas dan aktivitas dipantai oetuke diperkirakan pendapatan bumdes ditahun 2024 dan 2025 naik sebesar 0,57% - 0,90%.

## KESIMPULAN

Dari aspek pengembangan pariwisata: Kesejahteraan masyarakat dapat terjadi dengan adanya pengembangan pariwisata seperti membangun cafe, toko, perbaikan infrastruktur sehingga terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan menambah penghasilan masyarakat. Harus ada partisipasi masyarakat dalam pariwisata untuk dapat membantu pengembangan pariwisata karena masyarakat merupakan pemilik sumber daya pariwisata. Manfaat ekonomi dari pariwisata adalah dapat menciptakan lapangan kerja dan juga peluang usaha baru sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Perencanaan dan kontrol destinasi harus melibatkan ke tiga belah pihak yakni pemerintah desa, bumdes dan masyarakat lokal.

Dari aspek pendapatan: Pendapatan kotor bumdes nekamese mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2025. Dan Pendapatan bersih bumdes nekamese mengalami peningkatan dari tahun 2022 namun pada tahun 2023 menurun karena sebagian pendapatan bumdes dipakai untuk pengembangan obyek wisata, dan pada tahun 2024 hingga 2025 pendapatan bersih bumdes kembali meningkat.

Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat lokal terhadap perencanaan dan pengelolaan pengembangan pariwisata pantai oetuke, tidak adanya promosi yang dilakukan oleh bumdes maupun pemerintah desa, kurang memadainya sarana prasarana objek wisata serta fasilitas penunjang seperti akses jalan kurang memadai, lampu penerangan, fasilitas informasi, jaringan telekomunikasi, serta masyarakat lokal masih menganggap bahwa pantai oetuke masih milik masyarakat merupakan faktor-faktor yang menghambat pengembangan Pantai Oetuke.

Berdasarkan arus kas (*cash flow*) yang telah dibuat disimpulkan bahwa pendapatan bersih bumdes mengalami penurunan pada tahun 2021 lalu kembali meningkat pada tahun 2022,

tetapi kembali menurun ditahun 2023 disebabkan oleh pengeluaran kas untuk pengembangan obyek wisata oetuke dan diperkirakan meningkat lagi pada tahun 2024-2025.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Ndoen, W. M., Foenay, C. C., Chae, Y. K., & Anabuni, A. U. (2022). Pengembangan Pariwisata Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Kawasan Wisata Kabupaten TTS. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Darsono dan Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, Andi: Yogyakarta.
- Heri, Larasati. 2011. Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pati. Jurnal Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Laporan Arus Kas.
- Kuswadi. (2008). Memahami Rasio-Rasio Keuangan Bagi Orang Awam. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Maisyaroh, S. (2018, November 14). Repository UIN Raden Intan Lampung. Diambil kembali dari Repository UIN Raden Intan Lampung: <http://repository.radenintan.ac.id/4919/>
- PKDSP. (2007). Buku Panduan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Relawan desa. Jakarta Selatan
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Surahman, T., Sudiarta, I. N., & Ketut, S. I. (2020). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat Lokal Desa Wisata Sasak Ende, Lombok. Jurnal Analisis Pariwisata, 38-48.
- UNWTO, U. N. (2004, February 27). UNWTO. Diambil kembali dari UNTWO: <https://www.unwto.org/>
- Wibowo, S Andhika. 2016. Analisis Potensi Pengembangan Objek Wisata Alam Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Winardi. (2000). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yoeti, O. A. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, O. A. (2008). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- UU No, 10. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009. Journal of Human Development, 6(1), 1–22.
- UU No, 6 (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. Tahun 2014 Tentang Desa